

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap daerah. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang membuat ketidakberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah penting untuk melanjutkan kehidupan yang baik atau keadaan kekurangan pendapatan untuk mengatasi masalah-masalah pokok kehidupan termasuk pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan berasal dari adanya keterbelakangan, dan ketinggalan SDM yang diakibatkan rendahnya IPM akan menyebabkan rendahnya produktivitas¹. Akibatnya adalah rendahnya pendapatan dan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan.² Suatu penduduk bisa dikatakan miskin jika ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Terbatasnya sumber daya manusia, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal, dapat

¹ Sri Nurlayli dan Jumarni, “Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2022. hal. 114—130

² Maimun Sholeh, “Pengaruh Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Akses Informasi terhadap Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2022. hal. 61—72.

menyebabkan kemiskinan. Ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah, pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah, masalah kesehatan, gizi yang tidak memadai, dan tidak memiliki kesejahteraan, mereka dianggap miskin. Ini semua menunjukkan keadaan tidak berdaya.³

Kemiskinan secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu:⁴ *pertama*, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatannya adalah mengidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, setiap negara memiliki ukuran standar hidup minimal yang berbeda. *Kedua*, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

Kemiskinan terjadi dengan beberapa pola yang mendasarinya, yaitu:⁵ *pertama*, dari pola waktunya, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Pola kemiskinan seperti ini sedikit mengalami kesulitan dalam penanganannya, karena telah menjadi lingkaran setan kemiskinan yang membelit. *Kedua*, *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pada saat kondisi ekonomi sedang resesi, maka kemiskinan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pola *ketiga* adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering

³ Farah Hamidah Nuruz-Zahrah, *Pengaruh Islamic Human Development Index (IHDI), Kesempatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Intervening*, (Jakarta, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023), hal. 2

⁴ A. Jajang W. Mahri, et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hal. 206

⁵ *Ibid.*, hal. 212—213

dijumpai pada kasus petani tanaman pangan. Kemiskinan ini disebabkan karena adanya jeda waktu antara saat tanam dengan saat panen. Pola *keempat* adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu, akan tetapi kemiskinan ini hanya terjadi dalam sementara waktu.

Kemiskinan yang terjadi akan membawa dampak bagi individu atau keluarga yang berada dalam kondisi miskin tersebut. Sumber daya keuangan yang terbatas membatasi kemampuan orang untuk mengakses pelayanan perawatan kesehatan yang penting, yang mengakibatkan perawatan yang tidak memadai dan hasil kesehatan yang memburuk. Kurangnya dana mencegah individu miskin untuk mendapatkan perawatan medis, obat-obatan, dan pelayanan pencegahan, yang menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas.⁶ Ini merupakan dampak kemiskinan terhadap kemampuan akses pelayanan kesehatan. Akses kesehatan menjadi terhambat sehingga menurunkan kualitas kesehatan individu atau keluarga miskin.

Keluarga yang miskin, dengan pendapatan rendah, akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja lebih giat lagi. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sesuatu yang dapat diusahakan adalah dengan mempekerjakan anak mereka demi tambahan pendapatan. Anak-anak harus meninggalkan sekolahnya karena ikut bekerja

⁶ Aris Sarjito, "Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia", *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2024. hal. 398

menyokong kebutuhan ekonomi keluarga dan membantu kehidupan keluarga. Padahal anak-anak yang bekerja dapat membahayakan kesehatan mereka dan perkembangan dirinya karena dapat mengganggu aktivitas bermain dan pendidikan mereka. Kemiskinan dapat menjadi malapetaka bagi anak-anak.⁷ Dengan begitu, kemiskinan dapat menyita waktu dan kesempatan anak-anak untuk mengakses pendidikan mereka.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur per Kabupaten/Kota
Periode 2020—2023

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
Pacitan	14,54	15,11	13,8	13,65
Ponorogo	9,95	10,26	9,32	9,53
Trenggalek	11,62	12,14	10,96	10,63
Tulungagung	7,33	7,51	6,71	6,53
Blitar	9,33	9,65	8,71	8,69
Kediri	11,4	11,64	10,65	10,72
Malang	10,15	10,5	9,55	9,45
Lumajang	9,83	10,05	9,06	8,93
Jember	10,09	10,41	9,39	9,51
Banyuwangi	8,06	8,07	7,51	7,34
Bondowoso	14,17	14,73	13,47	13,34
Situbondo	12,22	12,63	11,78	11,9
Probolinggo	18,61	18,91	17,12	17,19
Pasuruan	9,26	9,7	8,96	9,24
Sidoarjo	5,59	5,93	5,36	5
Mojokerto	10,57	10,62	9,71	9,8
Jombang	9,94	10	9,04	9,15
Nganjuk	11,62	11,85	10,7	10,89
Madiun	11,46	11,91	10,79	11,04
Magetan	10,35	10,66	9,84	9,8
Ngawi	15,44	15,57	14,15	14,4

⁷ Lisa Nursita dan Bambang Sulisty P., “Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan”, *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. hal. 3

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
Bojonegoro	12,87	13,27	12,21	12,18
Tuban	15,91	16,31	15,02	14,91
Lamongan	13,85	13,86	12,53	12,42
Gresik	12,4	12,42	11,06	10,96
Bangkalan	20,56	21,57	19,44	19,35
Sampang	22,78	23,76	21,61	21,76
Pamekasan	14,6	15,3	13,93	13,85
Sumenep	20,18	20,51	18,76	18,7
Kota Kediri	7,69	7,75	7,23	7,15
Kota Blitar	7,78	7,89	7,37	7,3
Kota Malang	4,44	4,62	4,37	4,26
Kota Probolinggo	7,43	7,44	6,65	6,48
Kota Pasuruan	6,66	6,88	6,37	6,6
Kota Mojokerto	6,24	6,39	5,98	5,77
Kota Madiun	4,98	5,09	4,76	4,74
Kota Surabaya	5,02	5,23	4,72	4,65
Kota Batu	3,89	4,09	3,79	3,31
Jawa Timur	11,09	11,4	10,38	10,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa Persentase penduduk miskin di Jawa Timur secara provinsi dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan Persentase penduduk miskin. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022. Pada tahun selanjutnya, yaitu 2023, Persentase menurun dan berlangsung sampai tahun 2023. Peningkatan Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*. Pandemi tersebut mempengaruhi jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan.

Dilihat secara per kabupaten/kota, Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Kabupaten Sampang di Madura. Persentase selama empat tahun berturut-turut tetap yang tertinggi. Akan tetapi dapat

mengalami penurunan dalam kurun empat tahun tersebut. Yaitu dari 22,78% pada 2020, turun menjadi 21,76% di tahun 2023. Penyebab tingginya kemiskinan di Sampang adalah faktor pendidikan yang terkendala adat dan budaya masyarakat yang kurang mementingkan pendidikan formal. Selain itu, penduduk yang berpendidikan tinggi banyak yang merantau ke luar daerah (kota besar). Kemudian setelah sukses mereka enggan kembali ke daerah asal.⁸

Sedangkan kabupaten/kota dengan Persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Batu. Persentase kemiskinan di Kota Batu adalah terendah selama empat tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2023. Secara garis besar, Persentasenya selama empat tahun tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 3,89% pada 2020 menjadi 3,31% di tahun 2023. Kota Batu mengembangkan tiga sektor unggulan yang terbukti ampuh dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Ketiga sektor tersebut adalah pariwisata, pertanian dan UMKM. Sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut.⁹

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi setiap negara bersamaan dengan kemiskinan. Setiap daerah juga menghadapi permasalahan ini. Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan erat dalam konteks ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi sering kali

⁸ BPS Kabupaten Sampang, Indikator Kesejahteraan Rakyat: Kabupaten Sampang 2023, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2023), hal. 68

⁹ Feri Ardiansyah, (ed), “Angka Kemiskinan Kota Batu Terendah se-Jawa Timur” dalam <https://www.rri.co.id>, diakses 18 November 2024

berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan, karena individu yang menganggur tidak memiliki penghasilan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini menyebabkan biaya sosial dan ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menangani kemiskinan juga semakin besar, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.¹⁰ Dengan demikian, pengangguran bukan hanya menjadi tantangan bagi individu saja, tetapi juga berdampak pada keadaan ekonomi secara keseluruhan, seperti penurunan produk nasional bruto, pendapatan per kapita, dan investasi yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara bertambahnya tenaga kerja dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selanjutnya dapat menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada permintaannya, sehingga memunculkan fenomena pengangguran. Di satu sisi, pengangguran menunjukkan adanya selisih antara permintaan (*demand of labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) dalam suatu perekonomian. Sedangkan pertambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah buruk.¹¹ Meningkatnya jumlah pengangguran tersebut terjadi

¹⁰ Suci Frisnoiry, et al., “Analisis Permasalahan Pengangguran di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2024. hal. 371

¹¹ Riza Firdhania, Fivien Muslihatinningsih, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember”, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017. hal. 118

karena pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah tenaga kerja, sehingga tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks di daerah, karena pengangguran dapat terjadi pada masyarakat yang berpendidikan tinggi, bukan hanya masyarakat berpendidikan rendah. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan.¹² Tingkat pengangguran kelompok muda yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹³ *Pertama*, faktor struktural. Faktor ini terdiri dari kurangnya keterampilan kelompok muda dibanding kelompok yang lebih matang, ketimpangan atau kendala geografis dan kelangkaan informasi yang menghambat pasar kerja, dan faktor usia ketika meninggalkan sekolah, biasanya meninggalkan sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi. *Kedua*, faktor non struktural yang terdiri dari kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak menerima karyawan baru, meningkatnya partisipasi perempuan termasuk mereka yang berstatus kawin kedalam angkatan kerja, persepsi pemuda terhadap tingkat upah yang masih rendah, serta persepsi karir maupun lingkungan kerjanya.

¹² Todaro, dalam Adiyanto, et al., “Angkatan Kerja Dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran”, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2020. hal. 67.

¹³ Nila Ayu Islamia, *Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2016*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 22

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran. Hubungan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran, menurut Kaufman dan Hotchkiss sebagaimana dikutip oleh Syurifto Prawira, adalah semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Selain itu, menurut Mankiw penetapan upah minimum yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.¹⁴

Angkatan kerja merupakan output dari pendidikan karena pendidikan menghasilkan input potensial bagi dunia kerja dan agen perubahan masyarakat serta sekaligus calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan sehingga salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan, di mana pendidikan seorang pekerja sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.¹⁵ Tingkat produktivitas tenaga kerja suatu wilayah dipengaruhi oleh penawaran tenaga kerja, pendidikan yang diprosikan dengan pekerja dengan *primary education, secondary education, dan tertiary education*, dan kesehatan yang diprosikan dengan angka *life expectancy* atau angka harapan hidup.¹⁶ Hal

¹⁴ Syurifto Prawira, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi... hal. 163

¹⁵ Ameilia Karisma, et al., “Pengaruh Pendidikan dan Investasi terhadap Pengangguran di Jawa *The Effect of Education and Investment on Unemployment in Java*”, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021. hal. 442

¹⁶ Arshad dan Malik, dalam Yohanna Adisti Krisna Dwi Putri dan Sri Kusreni, “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia”, *JIEP*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017. hal. 67

ini menunjukkan bahwa kesehatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengangguran disamping pendidikan.

Pengangguran yang terjadi dapat memberikan dampak kepada unsur lainnya. Pengangguran adalah penyebab kemiskinan terbesar dan perlu diberantas, tetapi hanya dapat diatasi salah satunya dengan cara menyediakan pekerjaan dan kesempatan kerja, daripada hanya sekedar himbauan atau slogan-slogan saja.¹⁷ Hal ini berarti pemerintah mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan yang sesuai. Jika pemerintah melakukan investasi dalam penyediaan lapangan kerja, hal ini tidak hanya akan menjaga stabilitas perekonomiannya, tetapi juga akan menciptakan banyak kesempatan bekerja.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa pengangguran dapat menimbulkan kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kebijakan dari pemerintah dan juga peran serta masyarakat.

Tabel 1.2
Persentase Pengangguran Jawa Timur per Kabupaten/Kota Periode
2020—2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	2,28	2,04	3,65	1,83
Kabupaten Ponorogo	4,45	4,38	5,51	4,66
Kabupaten Trenggalek	4,11	3,53	5,37	4,52
Kabupaten Tulungagung	4,61	4,91	6,65	5,65
Kabupaten Blitar	3,82	3,66	5,45	4,91
Kabupaten Kediri	5,24	5,15	6,83	5,79
Kabupaten Malang	5,49	5,4	6,57	5,7

¹⁷ Darma Rika Swaramarinda, “Analisis Dampak Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014. hal. 67

¹⁸ *Ibid.*

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lumajang	3,36	3,51	4,97	3,67
Kabupaten Jember	5,12	5,44	4,06	4,01
Kabupaten Banyuwangi	5,34	5,42	5,26	4,75
Kabupaten Bondowoso	4,13	4,46	4,32	4,15
Kabupaten Situbondo	3,85	3,68	3,38	3,27
Kabupaten Probolinggo	4,86	4,55	3,25	3,24
Kabupaten Pasuruan	6,24	6,03	5,91	5,48
Kabupaten Sidoarjo	10,97	10,87	8,8	8,05
Kabupaten Mojokerto	5,75	5,54	4,83	4,67
Kabupaten Jombang	7,48	7,09	5,47	4,66
Kabupaten Nganjuk	4,8	4,98	4,74	4,68
Kabupaten Madiun	4,8	4,99	5,84	5,14
Kabupaten Magetan	3,74	3,86	4,33	4,16
Kabupaten Ngawi	5,44	4,25	2,48	2,41
Kabupaten Bojonegoro	4,92	4,82	4,69	4,63
Kabupaten Tuban	4,81	4,68	4,54	4,4
Kabupaten Lamongan	5,13	4,9	6,05	5,46
Kabupaten Gresik	8,21	8	7,84	6,82
Kabupaten Bangkalan	8,77	8,07	8,05	6,18
Kabupaten Sampang	3,35	3,45	3,11	2,72
Kabupaten Pamekasan	3,49	3,1	1,4	1,74
Kabupaten Sumenep	2,84	2,31	1,36	1,71
Kota Kediri	6,21	6,37	4,38	4,06
Kota Blitar	6,68	6,61	5,39	5,24
Kota Malang	9,61	9,65	7,66	6,8
Kota Probolinggo	6,7	6,55	4,57	4,53
Kota Pasuruan	6,33	6,23	6,18	5,64
Kota Mojokerto	6,74	6,87	5,05	4,73
Kota Madiun	8,32	8,15	6,39	5,85
Kota Surabaya	9,79	9,68	7,62	6,76
Kota Batu	5,93	6,57	8,43	4,52
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur dalam rentang tahun 2020 sampai 2023 telah mengalami penurunan. Secara Persentase, penurunan terjadi secara terus

menerus, tanpa adanya fluktuasi. Yaitu dari angka 5,84% pada tahun 2020 menjadi 4,88% di tahun 2023. Jika dilihat secara per kabupaten/kota, pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat tahun berturut-turut Persentase pengangguran di Sidoarjo adalah yang tertinggi. Yaitu sebesar 10,97% pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 8,05% di tahun 2023. Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh lulusan SMK. Tingginya angka pengangguran ini merupakan dampak pandemi *Covid-19*. Penyebab lainnya adalah banyak lapangan kerja yang tutup, dan lapangan kerja baru hanya sedikit. Sementara lulusan sekolah terus mengalami penambahan.¹⁹

Sedangkan Persentase pengangguran terendah menurut kabuapten/kota adalah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 dan 2021. Yaitu pada angka 2,28% dan 2,04%. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 pengangguran terendah ditempati oleh Kabupaten Sumenep. Yaitu pada angka 1,36% dan 1,71%. Sektor yang memiliki peran besar dalam menurunkan tingkat pengangguran di Pacitan adalah pertanian. Sektor ini berperan lebih besar daripada sektor lainnya.²⁰ Sedangkan di Sumenep, penurunan angka pengangguran dipengaruhi oleh program *recovery*

¹⁹ M Taufik, (ed), “Ini Penyebab Pengangguran di Sidoarjo Masih Tertinggi di Jatim, Lulusn SMK Mendominasi” dalam <https://www.google.co.id/amp/s/jatim.tribunnews.com>, diakses 19 November 2024

²⁰ “Data BPS Pengangguran Terbuka Pacitan Turun” dalam <https://lintas7.net>, diakses 19 November 2024

ekonomi pasca pandemic *Covid-19* berjalan maksimal, sehingga jumlah warga yang bekerja terus meningkat.²¹

Jika dibandingkan dengan data kemiskinan pada tabel 1.1, terdapat kesamaan secara garis besar. Yaitu kemiskinan dan pengangguran sama-sama mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2023. Hal yang membedakan adalah kemiskinan mengalami fluktuasi, baik secara Persentase maupun jumlahnya. Fluktuasi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pengangguran mengalami penurunan tanpa adanya fluktuasi.

Kemiskinan dapat terjadi berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkannya. Faktor-tersebut adalah ketidakberdayaan, keterkucilan, kemiskinan materi, kerentanan, dan sikap.²² Ketidakberdayaan muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan. Keterkucilan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit. Kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya penghasilan, selanjutnya berakibat pada kemiskinan materi. Kerentanan diakibatkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam. Faktor sikap, disebabkan oleh sikap yang menerima apa adanya kondisi yang ada dan kurang termotivasi untuk bekerja keras yang membuat orang tetap pada kondisi miskin.

²¹ Nur Faishal, “Pengangguran Terbuka di Sumenep Terendah se Jatim, Ini Datanya” dalam <https://www.viva.co.id>, diakses 19 November 2024

²² Isdjoyo, dalam A. Jajang W. Mahri, et al., *Ekonomi Pembangunan Islam...* hal. 214

Masih terdapat hal lain yang menjadi faktor penyebab kemiskinan. Menurut Samuelson dan Nordhaus Sebagaimana dikutip oleh Anggit, penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.²³ Hubungan antara pendapatan disatu sisi dan kesehatan serta pendidikan di sisi yang lain.²⁴ Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan suatu kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan alat yang biasa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dalam meningkatkan kesehatan.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki dampak terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis.²⁶ Apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan di suatu negara atau daerah. Sementara

²³ Anggit Yoga Permana, *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*, (Semarang, 2012), hal. 39

²⁴ Todaro, dalam Andi Lopa Ginting, “Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan”, *EcceS: Economics Social and Development Studies*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020. hal. 46

²⁵ Arfa Valiant Kevin, et al., “Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021”, *Sibatik Journal*, Vol. 1 No. 12 Tahun 2022. hal. 2962

²⁶ Todaro dan Smith, dalam Andi Lopa Ginting, “Dampak Angka Harapan ... hal. 46

²⁷ Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk, “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 No. 3 Tahun 2020. hal. 360

menurut Suparlan dalam Yulia, hal yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima (*acceptable*).²⁸ Dengan begitu, upah yang diterima oleh masyarakat dapat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka.

Selain beberapa faktor tersebut, masih terdapat faktor lain yang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Faktor tersebut adalah rendahnya kualitas angkatan kerja; akses yang sulit terhadap kepemilikan modal; rendahnya penguasaan teknologi; penggunaan sumber daya yang tidak efisien; dan tingginya pertumbuhan penduduk.²⁹ Kelima hal ini dapat terjadi secara bersamaan di suatu daerah, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Selain itu, bisa juga hanya beberapa faktor yang berlaku pada suatu daerah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing.

Keadaan kemiskinan di suatu daerah bisa diperkirakan terkait hubungannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan bahwa faktor-faktor kemiskinan yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan

²⁸ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2021. hal. 122

²⁹ Himawan Yudistira Dama, et al., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 3 Tahun 2016. hal. 555

bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.³⁰

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.³¹

Tabel 1.3
PDRB Provinsi Jawa Timur Periode 2020—2023

Tahun	PDRB ADHK 2010 (triliun)	PDRB ADHB (triliun)
2020	Rp1.610,42	Rp2.299,46
2021	Rp1.669,12	Rp2.454,50
2022	Rp1.757,82	Rp2.730,91
2023	Rp1.884,80	Rp2.953,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

³⁰ Himawan Yudistira Dama, et al., “Pengaruh Produk Domestik ... hal. 556

³¹ Kuncoro, dalam Himawan Yudistira Dama, et al., “Pengaruh Produk Domestik... hal.

Berdasarkan tabel 1.3, dapat diketahui bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2020 sampai 2023. Peningkatan terus terjadi tanpa adanya fluktuasi. PDRB terus bertambah baik yang berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan 2010. Atas dasar harga konstan 2010, PDRB tahun 2020 adalah Rp1.610,42 triliun. Terus mengalami peningkatan sampai sebesar Rp1.8844,80 triliun di tahun 2023. Berdasarkan harga berlaku, PDRB memiliki nilai yang lebih besar. Yaitu Rp2.299,46 triliun di tahun 2020, meningkat menjadi Rp2.953,54 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tabel 1.1, PDRB berbanding terbalik dengan kemiskinan. PDRB terus meningkat, sedangkan angka kemiskinan mengalami penurunan. Baik dari jumlah penduduk miskin maupun Persentasenya.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan setiap negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki program dalam mengentaskan kemiskinan agar jumlah penduduk yang hidup dalam jerat kemiskinan menjadi semakin sedikit. Meskipun demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan juga menjadi tanggung jawab individu atau keluarga yang berada dalam kondisi miskin itu sendiri. Dalam Islam, terdapat konsep yang dapat dipakai dalam strategi pengentasan kemiskinan. Islam sebagai agama yang menyeluruh, juga menyinggung soal pengentasan kemiskinan. Seperti yang telah tertuang dalam *maqashid syariah*.

Secara terminologi, *maqasid syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:³² *Pertama*, *daruriyyat*, merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis *daruriyyat*. Lima poin dasar tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kedua adalah *hajjiyat*, merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajjiyat* juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap sehingga dapat menunjang kehidupan manusia. *Ketiga* adalah *tahsiniyat*, merupakan kebutuhan penyempurna, tetapi tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap.

Maqashid syariah sebagai landasan dasar dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan hidup tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dapat diwujudkan dengan pemenuhan seluruh

³² A. Jajang W. Mahri, et al., *Ekonomi Pembangunan Islam...* hal. 208—209

kebutuhan hidup manusia sehingga akan memberikan dampak kemashalatan. Masalahat merupakan kondisi dimana aspek materiel dan non-material sudah terpenuhi dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Berdasarkan *maqashid syariah*, konsep yang digunakan dalam mengentaskan kemiskinan mengedepankan kedudukan manusia sebagai khalifah di dunia. Konsep ini juga menitikberatkan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, bermanfaat secara sosial serta tidak menyalahgunakan. Kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Adapun pengentasan kemiskinan berdasarkan *maqashid syariah* melalui pengaplikasian Ziswaf yang lebih luas adalah dengan aktivitas produksi, investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.³³

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Keberadaan *Human Development Index* (HDI) yang ditawarkan oleh UNDP sebagai salah satu alat yang dapat di pakai untuk mengukur pembangunan manusia mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam, teori dan konsepnya yang mendasari untuk membangun HDI tidak berdasarkan pada *maqashid syariah*. Untuk

³³ A. Jajang W. Mahri, et al., *Ekonomi Pembangunan Islam...* hal. 210

mengukur pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan I-HDI, di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada maqashid syariah. I-HDI di hitung berdasarkan indikator yang mencerminkan terhadap pemeliharaan lima dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks setiap dimensi adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4

**Indikator untuk Menghitung I-HDI Provinsi Jawa Timur Periode
2020—2023**

Indikator I-HDI	2020	2021	2022	2023
Angka Kriminalitas	24.186	24.844	60.236	21.046
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,3	71,38	71,74	72,11
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,19	13,36	13,37	13,38
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,78	7,88	8,03	8,11
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,79	0,7	0,68	0,77
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)	11.601	11.707	11.992	13.870
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,82	1,84	1,62	1,63
Indeks Gini	0,366	0,374	0,371	0,387

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dalam rentang waktu 2020 sampai 2023, masing-masing indikator mengalami peningkatan atau penurunan. Indikator yang mengalami peningkatan adalah angka harapan hidup; harapan lama sekolah; rata-rata lama sekolah; pengeluaran perkapita; dan

³⁴ Haqiqi Rafsanjani, (ed.), *Islamic Human Development Index di Indonesia*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018), hal. 1

indeks gini. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan adalah angka kriminalitas (meskipun sempat berfluktuasi tinggi); laju pertumbuhan penduduk; dan indeks kedalaman kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Persentase kemiskinan pada tabel 1.1, maka indikator yang mengalami penurunan adalah berbanding lurus dengan kemiskinan. Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan adalah berbanding terbalik dengan kemiskinan.

Salah satu sumber penghasilan adalah upah, upah merupakan imbalan dari hasil kerja yang dilakukan. Bila upah yang diterima oleh turun atau tetap maka akan mempengaruhi kesejahteraan. Dalam suatu wilayah atau daerah, terdapat kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.³⁵ Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Upah minimum merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.³⁶ Secara teoritis, upah minimum dapat memiliki berbagai dampak, tergantung pada struktur pasar tenaga kerja, perilaku pengusaha dan pekerja, dan seberapa tinggi upah minimum dalam kaitannya dengan hasil keseimbangan tanpa regulasi.³⁷ Upah minimum memiliki dampak terhadap pengangguran. Pengangguran terjadi akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu ketidakmampuan upah dalam

³⁵ Upah Minimum Provinsi, (Yogyakarta: BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2004)

³⁶ Farah Hamidah Nuruz-Zahrah, *Pengaruh Islamic Human...* hal. 10

³⁷ *Ibid.*, hal. 11

melakukan penyesuaian sampai di titik ekuilibrium, di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, meningkatnya tingkat upah membuat penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. Penyebab kekakuan upah antara lain: peraturan upah minimum, serikat pekerja dan efisiensi upah.³⁸

Tabel 1.5
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Provinsi (UMP) di Jawa Timur (Rupiah) Periode 2020—2023

Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Pacitan	1.913.322	1.961.155	1.961.155	2.157.270
Kab. Ponorogo	1.913.322	1.938.322	1.954.281	2.149.709
Kab. Trenggalek	1.913.322	1.938.322	1.944.933	2.139.426
Kab. Tulungagung	1.958.844	2.010.000	2.029.359	2.229.359
Kab. Blitar	1.954.706	2.004.706	2.015.071	2.215.071
Kab. Kediri	2.008.504	2.033.505	2.043.423	2.243.423
Kab. Malang	3.018.531	3.068.275	3.068.275	3.268.275
Kab. Lumajang	1.982.295	1.982.295	2.000.607	2.200.607
Kab. Jember	2.456.303	2.355.663	2.355.663	2.555.663
Kab. Banyuwangi	2.319.797	2.314.279	2.328.899	2.528.899
Kab. Bondowoso	1.954.706	1.954.706	1.958.640	2.154.504
Kab. Situbondo	1.913.322	1.938.322	1.942.751	2.137.026
Kab. Probolinggo	2.503.266	2.553.266	2.553.266	2.753.266
Kab. Pasuruan	4.190.133	4.290.133	4.365.133	4.515.133
Kab. Sidoarjo	4.193.582	4.293.582	4.368.582	4.518.582
Kab. Mojokerto	4.179.787	4.279.787	4.354.787	4.504.787
Kab. Jombang	2.794.802	2.654.096	2.654.096	2.854.096
Kab. Nganjuk	1.954.706	1.954.706	1.970.006	2.167.007

³⁸ Mankiw, dalam Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo, “Efek Peningkatan Upah...
hal. 52

Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Madiun	1.913.322	1.951.588	1.958.410	2.154.251
Kab. Magetan	1.913.322	1.938.322	1.957.329	2.153.062
Kab. Ngawi	1.913.322	1.960.510	1.962.586	2.158.845
Kab. Bojonegoro	2.016.780	2.066.782	2.079.568	2.279.568
Kab. Tuban	2.654.096	2.532.235	2.539.225	2.739.225
Kab. Lamongan	2.314.279	2.488.725	2.501.977	2.701.977
Kab. Gresik	4.197.031	4.297.031	4.372.031	4.522.031
Kab. Bangkalan	1.954.706	1.954.706	1.956.773	2.152.451
Kab. Sampang	1.913.322	1.938.322	1.922.123	2.114.335
Kab. Pamekasan	1.913.322	1.938.322	1.939.686	2.133.655
Kab. Sumenep	1.954.706	1.954.706	1.978.927	2.176.820
Kota Kediri	2.060.925	2.085.925	2.118.117	2.318.117
Kota Blitar	1.954.636	2.004.706	2.039.024	2.239.024
Kota Malang	2.895.503	2.970.503	2.994.144	3.194.144
Kota Probolinggo	2.355.663	2.350.000	2.376.241	2.576.241
Kota Pasuruan	2.532.235	2.819.802	2.838.838	3.038.838
Kota Mojokerto	2.423.725	2.481.303	2.510.452	2.710.452
Kota Madiun	1.954.706	1.954.706	1.991.106	2.190.216
Kota Surabaya	4.200.479	4.300.479	4.375.479	4.525.479
Kota Batu	2.794.800	2.819.802	2.830.367	3.030.367
JAWA TIMUR	1.768.777	1.868.777	1.891.567	2.040.244

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Dari tabel 1.5 diatas, dapat diketahui bahwa upah minimum Provinsi Jawa Timur telah mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2023. Kenaikan dari sebesar Rp1.768.000 pada tahun 2020 dan menjadi sebesar Rp2.040.244 pada tahun 2023. Kenaikan terjadi dalam setiap tahunnya selama rentang waktu tersebut. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan pada tabel 1.1, maka dapat diketahui bahwa keduanya berbanding terbalik. Upah minimum selalu mengalami kenaikan dalam rentang tahun 2020 sampai 2023, sedangkan kemiskinan secara garis besar mengalami penurunan sepanjang waktu tersebut.

Jika dilihat secara kabupaten/kota, upah minimum tertinggi adalah di Kota Surabaya. Dalam kurun 2020 sampai 2023 UMK Surabaya adalah yang paling tertinggi. UMK Surabaya juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp4.200.479 pada 2020 menjadi Rp4.525.479 di tahun 2023. Hal yang menyebabkan UMK Surabaya tertinggi adalah biaya hidup yang tinggi. Harga dari kebutuhan pangan dan sandang serta kebutuhan lainnya lebih mahal jika dibandingkan daerah lain.

Sedangkan untuk UMK terendah, pada tahun 2020 ada beberapa daerah. Yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. UMK daerah tersebut adalah sebesar Rp1.913.322. Kemudian pada tahun 2022 ada enam daerah dengan UMK terendah. Yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. UMK daerah tersebut adalah sebesar Rp1.938.322. Pada tahun 2023 hanya ada satu daerah dengan UMK terendah. Yaitu Kabupaten Sampang sebesar Rp1.922.123. Kemudian di tahun 2023 juga hanya Kabupaten Sampang yang UMK-nya terendah, yaitu sebesar Rp2.114.335. Dengan begitu, Kabupaten Sampang memiliki UMK terendah selama kurun waktu empat tahun tersebut. Meskipun demikian, besaran UMK mengalami peningkatan dari 2020 sampai 2023.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan. I-HDI dan upah minimum telah digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kemiskinan. Akan tetapi, belum terdapat penelitian untuk analisis Pengaruh I-HDI dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur periode 2020—2021. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2020—2023 adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan empat provinsi lainnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dengan judul “Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Timur”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan untuk bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki; dan rendahnya pendapatan; serta sulitnya akses terhadap sumber penghasilan. Kemiskinan berdampak pada kualitas kesehatan dan pendidikan.
2. Pengangguran disebabkan oleh tingkat upah buruh dan kompetensi dari seseorang. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan.

3. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) mempengaruhi kualitas pembangunan SDM ditinjau dari *maqashid syariah*.
4. Upah minimum dapat menjamin tingkat pendapatan para pekerja agar dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka.

Batasan dalam penelitian ini adalah hanya dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur dan hanya dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Pengangguran?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Pengangguran?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Kemiskinan?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Kemiskinan?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung Pengangguran terhadap Kemiskinan?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan?

7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Upah Minimum melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Pengangguran.
2. Menguji pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Pengangguran.
3. Menguji pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Kemiskinan.
4. Menguji pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Kemiskinan.
5. Menguji pengaruh langsung Pengangguran terhadap Kemiskinan.
6. Menguji pengaruh tidak langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan.
7. Menguji pengaruh tidak langsung Upah Minimum melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi sumber literasi untuk pembelajaran di bidang ekonomi pembangunan Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sumber pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran khususnya di Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Akademik

Sebagai kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi dan ekonomi syariah khususnya dalam kajian ekonomi makro.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi serta bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel terikat (*dependent*), variabel mediasi (*intervening*), dan variabel bebas (*independent*). Variabel terikat yaitu Kemiskinan, variabel mediasi yaitu Pengangguran, adapun variabel bebas yaitu *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, dan Upah Minimum. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel yaitu data time series dari 2020-2023. Sampel data dalam penelitian ini merupakan data *I-HDI*, Upah

Minimum, Pengangguran, dan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur secara semester dari 2020-2023.

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

a. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai *falah*).³⁹

b. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.⁴⁰

c. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai

³⁹ Haqiqi Rafsanjani, (ed.), *Islamic Human Development Index...* hal. 31

⁴⁰ Upah Minimum Provinsi, ...

bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).⁴¹

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.⁴²

2. Penegasan Operasional

Dari definisi yang telah diuraikan diatas secara konseptual, maka untuk secara operasionalnya dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Timur” bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua faktor yang terdiri dari *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai variabel intervening.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan dalam setiap bab nya. Hal ini bertujuan agar penulisan lebih terarah dalam memberikan pembahasan. Sistematika penulisan tersebut meliputi:

⁴¹ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hal. 11

⁴² A. Jajang W. Mahri, et al., *Ekonomi Pembangunan Islam...* hal. 212

- BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup penelitian; penegasan variabel; dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan Teori, terdiri dari: teori yang membahas variabel/sub variabel pertama; teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya; kajian penelitian terdahulu; kerangka teori; dan hipotesis penelitian.
- BAB III** : Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian; lokasi penelitian; variabel dan pengukuran; populasi, sampling dan sampel penelitian; teknik pengumpulan data; dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian, terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian; deskripsi data; dan pengujian hipotesis.
- BAB V** : Pembahasan, berisi pembahasan hasil penelitian.
- BAB VI** : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan.